

**PENDAMPINGAN BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN PADA
PELAKU USAHA MIKRO PEMULA DI WILAYAH SEMOLOWARU
KOTA SURABAYA**

Ute Chairuz M. Nasution

Pusat Kajian Bisnis dan Koperasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
uthe@untag-sby.ac.id;

Supri Hartono

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
suprihartono@untag-sby.ac.id;

Yudhi Hari Wibowo

Program Studi Ilmu Komunikasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
yudhihw@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Partisipasi terbesar dalam menggerakkan roda ekonomi nasional jika dilihat dari sudut kuantitas pelaku yang terlibat dilakukan oleh pelaku usaha dalam kategori Mikro, Kecil dan Menengah (MKM) yang jumlahnya mencapai lebih dari sembilan puluh persen. Meskipun secara kuantitas Partisipasi yang disumbangkan pelaku usaha MKM ternyata tidak berbanding lurus dengan sumbangannya terhadap PDRB, sumbangan terhadap PDRB lebih banyak disumbang oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya jauh berada dibawah pelaku usaha MKM. Kondisi ini artinya bahwa para pelaku usaha MKM perlu mendapatkan perhatian dari pemangku kekuasaan dan kita semua yang mempunyai kepedulian terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendorong dan dan berupaya meningkatkan kualitas partisipasi mereka minimalnya mendekati partisipasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha besar. Peningkatan kualitas partisipasi pelaku usaha mikro dan kecil ini juga berarti meningkatkan kualitas pembangunan pada semua sektor kehidupan yang tengah dilakukan bangsa ini.

Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas partisipasi dalam pembangunan para pelaku usaha mikro dan kecil salah satunya dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan, karena disinyalir pengetahuan dan keterampilan para pelaku usaha dalam tanda petik masih sangat rendah dibandingkan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah usaha.

Kata kunci: *Pelatihan dan pendampingan*

A. PENDAHULUAN

Menurut CNBC Indonesia (2019) bahwa pada masa kejayaan Migas (oil boom), Indonesia yang merupakan negara penghasil minyak juga sempat merasakan kejayaannya. Betapa tidak pada masa kejayaannya, komoditi ini mampu memenuhi/menopang hampir seluruh kebutuhan biaya/anggaran yang dibutuhkan bangsa ini untuk menggerakkan roda perekonomiannya. Kondisi dimana migas mampu membiayai hampir seluruh kebutuhan biaya/anggaran ini membuat bangsa yang dalam hal ini pemerintah terlena menggantungkan hidupnya hanya pada komoditi minyak. Pemerintah dikatakan terlena karena seolah tidak mempunyai tugas untuk mengeksplorasi potensi lain yang dimiliki bangsa ini untuk berpartisipasi membiayai roda perekonomian atau pembangunan yang tengah dijalankan pada semua aspek kehidupan. Pemerintah mulai terbangun dari mimpi panjangnya ketika minyak sudah tidak dapat lagi dijadikan sebagai tumpuan untuk menopang anggaran/biaya yang dibutuhkan bangsa ini untuk menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan yang tengah dijalankan untuk mensejajarkan posisi bangsa ini dengan bangsa-bangsa lain yang ada di muka bumi. Pemerintah mulai menyadari bahwa pembangunan pada semua aspek kehidupan ini tidak lagi dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan pada satu komoditi yang dimiliki tetapi harus menggali semua potensi yang dimiliki bangsa untuk dapat menggerakkan roda pembangunan. Potensi yang sebelumnya tidak terjamah terutama potensi yang dimiliki bangsa selain Migas harus terus dieksplorasi dan dikembangkan untuk dapatnya komoditi ini berpartisipasi menggerakkan roda pembangunan.

Kesadaran pemerintah untuk tidak hanya menggantungkan diri pada satu komoditi saja ini meskipun dapat dikatakan agak terlambat muncul ketika tidak migas lagi mampu memberikan kontribusi seperti yang diharapkan untuk membiayai pembangunan yang tengah dijalankan bangsa ini. Memperhatikan kemampuan migas yang terus berada dibawah ekspektasi, Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pada intinya merangsang pelaku usaha yang bergerak di bidang non migas untuk berpartisipasi atau dengan kata lain kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan-kebijakan yang berupaya merubah konsentrasi kegiatan ekonomi yang semula melulu pada kegiatan ekonomi pada sektor migas ke konsentrasi non migas.

Kebijakan-kebijakan yang hakekatnya berupaya merubah konsentrasi kegiatan ekonomi dari migas ke non migas jika dilihat dari sudut pandang mikro memang cukup menjanjikan, tetapi jika dilihat secara makro tujuan dari kebijakan ini dapat dikatakan masih jauh dari harapan yang digantungkan. Dikatakan demikian karena ketergantungan akan hasil komoditi migas dalam pembiayaan pembangunan masih belum tergoyahkan, sektor non migas meskipun mengalami peningkatan tetapi masih berada jauh dari harapan. Kondisi dimana sektor non migas masih berada jauh dari harapan ini bukan berarti menutup peluang kita untuk terus berharap pada komoditi non migas, harapan itu masih harus terus digantungkan terlebih jika kita lihat begitu besarnya potensi yang dapat dikembangkan. Potensi itu antara lain jika kita lihat dari para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang notabene adalah para pelaku usaha yang bergerak di bidang non migas. Jumlah para pelaku usaha untuk kategori ini yang mendekati

angka 100% ini merupakan potensi yang luar biasa yang dimiliki bangsa ini, tetapi jika dilihat kemampuan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ini mereka untuk sementara hanya memberikan kontribusi sebesar 40% pada PDRB, sementara pelaku usaha besar yang jumlahnya tidak sampai 1 % mampu menyumbang 60% dari PDRB.

Dengan ilustrasi yang ada ini bisa kita bayangkan jika 5% atau 10 % saja dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah mampu mendekati kemampuan para pelaku usaha besar. Jika hal itu terjadi maka begitu besar peningkatan PDRB yang hal itu juga berarti begitu besar potensi yang dimiliki bangsa ini untuk menggerakkan roda pembangunan, tetapi data masih tetap menunjukkan angka yang menunjukkan dominasi para pelaku usaha besar dalam kontribusi terhadap PDRB. Para pelaku mikro, kecil dan menengah untuk sementara masih tetap menjadi penyumbang terbesar jumlah pelaku usaha. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tampaknya masih harus tetap mendapatkan pendampingan untuk merangsang mereka agar mampu meningkatkan partisipasi dan kontribusinya untuk membiayai pembangunan yang tengah dilaksanakan.

B. METODE PELAKSANAAN

Menyikapi kondisi rendahnya kontribusi yang diberikan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah jika dibandingkan dengan pelaku usaha besar ini dalam PDRB, Pusat Kajian Bisnis dan Koperasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berinisiatif melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta atau partisipasi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar mereka mampu untuk terus memberikan dan meningkatkan kontribusinya dalam pembiayaan pembangunan. Upaya untuk meningkatkan kontribusi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan Pusat Kajian Bisnis dan Koperasi (PKBK) FISIP Untag Surabaya ini melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo.

a. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang dilakukan PKBK FISIP Untag Surabaya dalam upaya meningkatkan kemampuan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan dan pendampingan pada bidang Administrasi dan Administrasi Keuangan. Materi ini dipilih karena dari hasil pemantauan awal materi ini masih kurang dipahami oleh para pelaku usaha, terutama para pelaku usaha yang baru memulai menjalankan usaha.

b. Sasaran Dan Lokasi Kegiatan

Sasaran Kegiatan Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan ini adalah para pelaku usaha yang dalam hal ini lebih diutamakan pada para pelaku usaha mikro pemula. Para pelaku usaha pemula yang menjadi sasaran pelatihan dan pendampingan karena seperti halnya yang dilakukan dalam pemantauan awal mengenai sasaran pelatihan dan pendampingan karena para pelaku usaha yang menjadi sasaran sebagian besar masih belum atau kesulitan untuk menentukan mana yang menjadi kekayaan perusahaan dan mana kekayaan yang menjadi milik pelaku usaha. Pelaku usaha mikro pemula yang terpilih untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan Bidang Administrasi dan Administrasi Keuangan

adalah pelau usaha di kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

c. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana kegiatan Penyuluhan dan pendampingan bidang Administrasi dan Administrasi Keuangan ini dilaksanakan dibawah pengelolaan Pusat Kajian Bisnis dan Koperasi (PKBK) FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan personalia yang terlibat: Drs. Ute Chairuz M. Nasution, MS. sebagai Ketua ; Dra. Ni Made Ida Pratiwi, MM., ; Drs. Supri Hartono, MS., ; Drs. Yudhi Hari Wibowo, Msi sebagai Anggota.

C. PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran suatu negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tinggi maka kondisi ini seharusnya menjadi indikator tingkat kemakmuran yang tinggi juga. Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu dapat dijadikan sebagai indikator kemakmuran hal ini artinya untuk kondisi tertentu pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan kemakmuran suatu negara. Kondisi tertentu yang dimaksud disini adalah kondisi dimana pertumbuhan ekonomi yang terjadi adalah pertumbuhan yang bias. Pada kondisi ini pertumbuhan yang seharusnya dapat dinikmati oleh banyak orang ternyata hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja.

Kondisi pengecualian ini juga terjadi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara ini dapat dikatakan selalu tinggi tetapi pertumbuhan yang tinggi ini tidak diiringi dengan peningkatan kemakmuran bangsa ini. Pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pelaku usaha yang bekerja lebih efisien dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya. Dikatakan segelintir pelaku usaha, karena pelaku usaha yang dikatakan lebih efisien tersebut adalah pelaku usaha besar yang notabene jumlahnya kurang dari 1 % dari seluruh pelaku usaha yang berpartisipasi menggerakkan roda ekonomi di Indonesia. Jika dilihat dari jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi menggerakkan roda ekonomi bangsa ini memang sangat rendah, tetapi meskipun demikian mereka mampu menyumbang hampir 60 % dari PDRB yang artinya lebih dari 99 % pelaku usaha lainnya hanya mampu menyumbang pada kisaran 40% PDRB pada awal tahun 2000 an. Pada tahun terakhir (2022) kondisi ini mulai berbalik, dimana pelaku usaha mikro, kecil dan menengah mulai mampu memberikan kontribusi pada PDB sebesar 60 % dan sisanya 40% merupakan sumbangan dari para pelaku usaha besar yang jumlahnya tetap tidak bergerak masih pada tataran 1% dari seluruh pelaku usaha yang berpartisipasi dalam menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Meskipun sudah terjadi peningkatan dalam sumbangan terhadap PDB yaitu 40 % pada awal tahun 2000 an menjadi 60% pada tahun 2022 tetapi angka ini masih jauh dari ekspektasi mengingat jumlah pelaku usaha MKM yang begitu besar jika dibandingkan dengan pelaku usaha besar. Harapan yang digantungkan terhadap para pelaku UMKM adalah bahwa kemampuan mereka mampu mendekati kemampuan dari para pelaku usaha besar. Dapat kita bayangkan jika 5% saja dari pelaku UMKM dalam rentang waktu 10 atau 20 tahun mampu mendekati atau menyamai kemampuan pelaku usaha besar maka dapat

dibayangkan betapa besar peningkatan potensi bangsa ini dalam menggerakkan roda ekonominya.

Memperhatikan kondisi (data) tentang kemampuan pelaku UMKM ini sepertinya perlu adanya terobosan untuk mampu meningkatkan kemampuan dari pelaku UMKM agar kontribusinya dalam menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan bisa meningkat sehingga mampu menjawab harapan yang digantungkan bangsa ini atas peran serta UMKM dalam menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan. Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan pemerintah melalui regulasi-regulasi yang hakekatnya meningkatkan kemampuan pelaku UMKM menggerakkan roda ekonomi dan roda pembangunan yang tengah dilaksanakan oleh bangsa ini. Stimulan dan terobosan ini tidak semata merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah, terobosan ini juga dapat dilakukan oleh para pemerhati ;'apat melakukan terobosan dengan minimal menterjemahkan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Seperti halnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Aspek pembinaan terhadap para pelaku UMKM menurut Hidayat (2000) meliputi aspek Sumber Daya Manusia yang dapat dilakukan karena inisiatif sendiri atau karena adanya dorongan dari luar dan aspek Pengelolaan (praktek bisnis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan). Pembinaan terhadap para pelaku UMKM perlu dilakukan secara terus menerus (berkelanjutan), hal ini mendapat penekanan karena selama ini pembinaan yang dilakukan (terutama pembinaan yang dilakukan pemerintah) masih bersifat *ad hoc*. Memperhatikan kondisi seperti yang dikemukakan, Pusat Kajian Bisnis dan Koperasi (PKBK) FISIP UNTAG Surabaya merasa terpanggil untuk melakukan pembinaan terhadap para pelaku UMKM yang dalam hal ini adalah para pelaku Mikro Pemula di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Pembinaan yang dilakukan PKBK FSIP UNTAG Surabaya melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat "Penyuluhan dan Pendampingan Bidang Administrasi dan Administrasi Keuangan" Pelaku Usaha Mikro Pemula. Materi yang disampaikan pada penyuluhan dan pendampingan ini adalah materi tentang Administrasi dan Administrasi Keuangan, materi ini diberikan karena dari hasil survey awal dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku usaha Mikro belum atau belum mampu memisahkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan perusahaan. Ketidak mampuan untuk memisahkan ini menyulitkan bagi kita untuk melihat kinerja organisasi yang dalam hal ini kinerja keuangan perusahaan. Dengan adanya penyuluhan dan pendampingan diharapkan para pelaku usaha mampu memilah antara keuangan keluarga dan keuangan usaha yang dirintisnya. Dari hasil pelatihan dan pendampngan dapat diketahui bahwa kemampuan para pelaku usaha mikro pemula yang menjadi peserta pelatihan dan pendampingan mampu meningkatkan kemampuannya dalam memilah mana yang kekayaan yang menjadi milik perusahaan (usaha yang dirintis) dan mana bagian dari kekayaan tersebut yang merupakan milik pribadi.

Dengan kemampuan yang dimiliki para pelaku usaha mikro pemula ini mereka akan lebih leluasa dLm menentukan langkahnya karena mereka mengetahui kemampuan yang dimilikinya. Disamping itu mereka juga dengan

pelatihan dan pendampingan yang dilakukan ini para pelaku usaha mikro mempunyai kesempatan mengupdate kemampuannya karena adanya perubahan-perubahan dalam regulasi yang selama ini mereka tidak pahami.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran yang bisa diberikan dalam hasil pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengabdian masyarakat “Pendampingan Bidang Administrasi dan Keuangan Pada Pelaku Usaha Mikro Pemula Di Wilayah Semolowaru Kota Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
2. Pelatihan/penyuluhan tentang administrasi dan Keuangan mendapatkan respon positive dari peserta.
3. Adanya kemampuan untuk memilah dan mengadministrasikan kekayaan perusahaan yang terpisah dari kekayaan perorangan.
4. Pembinaan terhadap para pelaku usaha sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan.
5. Materi pembinaan memperhatikan kemampuan dasar para pelaku usaha

DAFTAR PUSTAKA

- CNBC INDONESIA (2019), Kejayaan Minyak Yang Padam & 'Ninabobo' BBM Yang Manjakan RI, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190815165123-17-92302/kejayaan-minyak-yang-padam-ninabobo-bbm-yang-manjakan-ri>; dipublish pada 15 August 2019 18:18
- DKP3A Kaltim, Perempuan Pelaku Usaha Mayoritas Berasal Dari UMKM, Memiliki Peran Dan Potensi Sangat Besar, <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2021/11/04/perempuan-pelaku-usaha-mayoritas-berasal-dari-umkm-memiliki-peran-dan-potensi-sangat-besar/> diupload pada November 4, 2021